

**MODEL TETRAPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN
BUMDES GUNA Mendukung PEREKONOMIAN DESA
MELALUI E-SAMDES PADA Badan PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS UPTD 4
LAMPUNG TENGAH)**

Oleh

**Octavia Aspriani
2126061006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**MODEL TETRAPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN BUMDES
GUNA Mendukung PEREKONOMIAN DESA MELALUI E-SAMDES
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (STUDI
KASUS UPTD 4 LAMPUNG TENGAH)**

**Oleh
Octavia Aspriani
2126061006**

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**Pada
Program Pasca Sarjana
Jurusan Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PASCA SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

Economic development at the village level is a crucial issue in achieving the welfare of rural communities. The Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in fostering local economic growth. In the digital era, leveraging E-SAMDES technology becomes an appropriate choice to support efficiency and transparency in village financial management. Aligned with this, the Tetrapreneur Model emphasizing entrepreneurship, empowerment, sustainability, and self-reliance serves as a foundation to strengthen the role of BUMDes.

A case study of UPTD 4 Lampung Tengah, a technical implementing unit in Lampung Province, exemplifies the implementation of the Tetrapreneur Model and E-SAMDES to boost the village economy and enhance the income of the community through BUMDes development. The integration of digital technology, fostering entrepreneurial skills among the community, and optimizing local potentials become a holistic approach to attain these objectives.

Through the E-SAMDES platform, the process of paying motor vehicle taxes can be integrated into a digital system, enhancing data accuracy and encouraging the community's compliance in paying taxes on time. The utilization of this technology also enables easier access for the community to make payments, positively impacting overall village financial management.

The Tetrapreneur Model and the implementation of E-SAMDES are expected to empower BUMDes as a vital pillar in driving the village economy and fostering community self-reliance. With a strong synergy among these elements, it is hoped that sustainable economic growth and improved welfare of the community in Lampung Tengah and surrounding areas can be achieved. However, continuous evaluation and support from up-to-date data and research findings are vital to optimizing the application of this model as a concrete step towards more advanced and inclusive village development.

Keywords: Tetrapreneur Model, Village-Owned Enterprises (BUMDes), E-SAMDES (Electronic Village System).

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi di tingkat desa menjadi isu yang krusial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa memegang peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal. Di era digital, pemanfaatan teknologi berbasis E-SAMDES menjadi pilihan tepat untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Selaras dengan itu, Model Tetrapreneur yang mengedepankan aspek berwirausaha, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kemandirian, menjadi landasan untuk memperkuat peran BUMDes.

Studi kasus pada UPTD 4 Lampung Tengah, sebuah unit pelaksana teknis di Provinsi Lampung, menjadi contoh implementasi Model Tetrapreneur dan E-SAMDES dalam mendukung perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan BUMDes. Integrasi teknologi digital, penguatan keterampilan wirausaha masyarakat, dan optimalisasi potensi lokal menjadi pendekatan holistik untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: Model Tetrapreneur, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), E-SAMDES (Elektronik Sistem Desa)

Judul : MODEL TETRAPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN BUMDES GUNA Mendukung PEREKONOMIAN DESA MELALUI E-SAMDES PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS UPTD 4 LAMPUNG TENGAH)

Nama Mahasiswa : OCTAVIA ASPRIANI
No Pokok Mahasiswa : 2126061006
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si
NIP. 19720918 200212 2 002

Prof. Dr. Noverman Duadij, M.Si.
NIP. 19691103 200212 2 002

**2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Dr. Surtpto, S.Sos, M.A.B
NIP. 19690226 199903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si. (.....)

Sekretaris : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. (.....)

Penguji Utama : Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D (.....)

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. In Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 03 Agustus 2023



PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Megister/Sarjana/Ahli Madya). Baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2023



OCTAVIA ASPRIANI

PERSEMBAHAN

**Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT dan segala
Ketulusan hati, ku persembahkan karya sederhana ini sebagai
tanda bakti dan cinta kasihku kepada :
Kedua orangtua tercinta ibu dan bapak,
atas segala kasih sayang, do'a, dan perjuangan untuk
keberhasilanku.**

**Teman-Temanku Semua atas dukungan dan kesabarannya yang telah
menemani dan membantuku dalam penyusunan Tesis ini**

**Almamater tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Model Tetrapreneur Dalam Pengembangan Bumdes Guna Mendukung Perekonomian Desa Melalui E-SAMDES Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Studi Kasus Uptd 4 Lampung Tengah)”**.

Selama proses penyusunan Tesis penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki maka, selama penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membimbing dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si., yang telah membantu dan ter memotivasi agar menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D selaku dosen penguji. yang telah banyak memberi arahan, saran dan nasihat sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyelesaikan tesis ini.

4. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Khususnya Jurusan Administrasi Negara atas bantuan yang diberikan.
5. Teristimewa untuk seluruh keluarga ku yang selalu memberikan doa di setiap tetes keringatmu demi tercapainya kesuksesanku.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai amal baik dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis

Octavia Aspriani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Model Tetrapreneur	18
2.3 Teori Nw Public Management	20
2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	27
2.5 Elektronik Samsat Desa (E-SAMDES)	28
2.6 Kerangka Pikir	29
III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Informan Penelitian	36
3.6 Sumber Data	37
3.7 Teknik Pengolahan Data	38
3.8 Teknik Analisis Data	39
3.9 Teknik Keabsahan Data	40

IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
	4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	44
	4.2 Deskripsi BUMDES di Lampung Tengah.....	48
	4.3 Penerapan E-Samdes pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.	54
	4.4 Hambatan yang dialami dalam Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.	61
V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan	65
	5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi *budgetair* yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Termasuk dalam objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Berdasarkan UU no 18 tahun 1997, UU no 34 tahun 2000 ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
- g) Pajak Parkir

Pengenaan pajak Provinsi ataupun kabupaten/kota ini tidak bersifat mutlak, namun disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah, karena tidak semua daerah di Indonesia mempunyai potensi penerimaan yang sama dalam tiap jenis pajak. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali terus potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan adalah sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut. Pajak sendiri merupakan suatu gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti antrian yang

panjang sehingga membuat wajib pajak jenuh dan malas, kurangnya pelayanan yang cekatan kepada wajib pajak, letak kantor samsat yang berada dipusat kota membuat para wajib pajak yang bertempat tinggal ditepi kota merasa kejauhan, Berdasarkan pengamatan dan data yang didapatkan ditemukan beberapa fokus masalah, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) *Online*, selain itu permasalahan pada internal organisasi diantaranya adalah :

1. Proses pembayaran hingga pencetakan TBPKB/ notice masih kurang efektif,
2. Proses administrasi membutuhkan proses verifikasi BANK sampai dengan 3 hari
3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya sistem administrasi online.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana pada umumnya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota maupun daerah.

Meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor bekas mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterima juga meningkat. pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ)

tersebut.

Pelayanan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sistem *Online* diharapkan dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum diberlakukan sistem manual. Oleh karena itu pemerintah provinsi lampug melalui BAPENDA melakukan inovasi pembayaran dengan salah satu kemudahan aplikasi yang bekerja sama dengan desa yaitu E-SAMDES aplikasi tersebut merupakan program pertama pembayaran pajak kendaraan bermotor di desa melalui bumdes, anda tidak perlu datang ke samsat, cukup mendatangi bumdes terdekat di lingkungan anda.

E-Samdes merupakan samsat desa dalam bentuk elektronik yang mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak berbentuk sebuah media online yang memudahkan fasilitas pembayaran pajak hingga di plosok desa². Program elektronik samsat desa merupakan sebuah rancangan struktur untuk mempermudah suatu permasalahan pembayaran pajak kendaraan atau (PKB) yang ada di pelosok desa jadi program ini merupakan struktur atau skema untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes terdekat.

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memiliki payung hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bunyi pasal tersebut yaitu

BUMDes sebagai pelaku ekonomi Desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan Desa dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Desa tersebut. BUMDes menjadi badan usaha milik desa yang pendirian dan pengelolaannya dilakukan oleh Desa, dari Desa dan untuk Desa dimana pelakunya adalah masyarakat pedesaan (Kirowati dan Dwi, 2018) Kualitas Bumdes disini menjadi Pusat kebutuhan konsumen atau masyarakat dalam mengelola kebutuhan desa agar tetap berjalan sehingga dana dari bumdes pun berjalan untuk memenuhi kebutuhan desa, dan juga dapat mengembangkan program e-samdes ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui bumdes yang ada di desa desa sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik.

Program E-samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi lampung bersama-samastakeholder terkait memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tinggal di pelosok desa. E-Samdes diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diwilayah masing-masing.

Strategi pengembangan model tetrapreneur merupakan model pengembangan yang harus difokuskan oleh BUMDes dalam meningkatkan daya saing di pasar ekonomi. Tetrapreneur adalah terobosan inovasi Desa yang berbasis empat pilar wirausaha yaitu: (1) Chainpreneur, merupakan rantai pasokan bisnis mulai dari hulu ke hilir; (2) Marketpreneur, adalah sarana bertukarnya nilai produk; (3) Qualitypreneur, yaitu kualitas produk melalui SDM yang berkualitas; dan (4)

Brandpreneur, berupa merek produk yang dapat memperkuat posisi strategis dalam pasar ekonomi (Cavinato, 2012). Desa yang mempunyai sumber daya yang luar biasa, akan kalah bersaing jika tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya di era persaingan bebas yang membutuhkan upaya ide kreatif dalam mengembangkan modal sosial yang dimilikinya. Pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat Desa merupakan hal penting untuk diperhatikan, apabila dapat dioptimalkan dengan baik

Pelaksanaan program aplikasi E-Samdes tentunya akan semakin memudahkan masyarakat dalam hal informasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. E-samdes adalah salah satu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah sistem pelayanan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. E-samdes merupakan layanan elektronik yang diharapkan mampu membayar pajak kendaraan bermotor dari rumah kapanpun dan dimanapun tanpa wajib pajak harus datang ke pusat pusat pembayaran pajak seperti samsat pusat, samsat keliling, dan samsat lainnya.

Pengembangan ekonomi di tingkat desa menjadi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu upaya yang dapat diimplementasikan adalah dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Di tengah era digital, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan desa, salah satunya adalah pemanfaatan platform E-SAMDES dalam mengelola administrasi dan keuangan desa secara lebih efisien dan transparan. Model Tetrapreneur, yang menekankan aspek berwirausaha, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kemandirian,

muncul sebagai landasan bagi pengembangan BUMDes. Studi kasus UPTD 4 Lampung Tengah, sebuah unit pelaksana teknis di Provinsi Lampung, menjadi contoh bagaimana Model Tetrapreneur dan E-SAMDES dapat diterapkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan BUMDes. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, meningkatkan keterampilan wirausaha masyarakat, dan mengoptimalkan potensi lokal, diharapkan model ini mampu menciptakan dampak positif bagi perekonomian desa dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Meski demikian, diperlukan data dan hasil penelitian terkini guna mendukung keberhasilan penerapan model ini serta evaluasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak jangka panjangnya.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat menjadi bagian dari pemanfaatan platform E-SAMDES dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan penerapan Model Tetrapreneur, BUMDes dapat berperan sebagai pemberdaya masyarakat dalam memahami pentingnya kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan berperan sebagai fasilitator dalam prosesnya.

Melalui penerapan E-SAMDES, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diintegrasikan dengan sistem digital yang memungkinkan pendataan dan pelaporan secara otomatis. Hal ini akan membantu meningkatkan akurasi data dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses administrasi. Selain itu, dengan akses yang lebih mudah melalui platform digital, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan dengan lebih praktis dan efisien.

Penggunaan teknologi dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor juga berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, karena keterbukaan dan transparansi informasi mengenai kewajiban pajak akan lebih mudah diakses oleh warga desa. Pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran pajak ini juga dapat dikelola dan dialokasikan secara lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya di desa.

Dengan adanya sinergi antara Model Tetrapreneur, BUMDes, dan pemanfaatan platform E-SAMDES untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian desa serta pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Pelaksanaan Program elektronik samsat desa ini belum terealisasi sepenuhnya pada daerah lain dan masih pada tahapan sosialisasi pada kebijakan ini dan akan mengoprasionalkan pada Implementasi Kebijakan E- Samdes. Program ini mulai diluncurkan di Provinsi Lampung bertujuan untuk *role model* atau percontohan pada daerah daerah lain yang ada di indonesia. Pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas bumdes, program elektronik samsat desa ini diluncurkan guna untuk memudahkan masyarakat di daerah pedesaan yang kesulitan untuk membayar pajak dikarenakan akses lokasi yang jauh atau kesulitan dalam proses pembayarannya dan juga untuk mengurai penumpukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Jadi terkait Implementasi Program Elektronik Samsat Desa dari segi penerapannya atau kinerja dari program ini yang menerapkan

sistem elektronik atau online dari Bumdes terdekat dilakukan guna meningkatkan kualitas Bumdes di Provinsi Lampung.

Pembayaran pajak kendaraan merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Provinsi Lampung. Namun, di banyak desa, proses pembayaran pajak kendaraan masih menghadapi kendala administratif dan kurangnya akses teknologi yang memadai. Akibatnya, potensi penerimaan dari pajak kendaraan tidak optimal, dan hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian desa.

Dengan menerapkan model tetrapreneur dan E-SAMDES dalam BUMDes, diharapkan proses pembayaran pajak kendaraan di desa-desa dapat ditingkatkan secara signifikan. Penggunaan teknologi digital, seperti platform E-SAMDES, memungkinkan warga desa untuk membayar pajak kendaraan secara online, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, melalui model tetrapreneur, kewirausahaan dapat digalakkan untuk memperkuat promosi dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak.

Dengan peningkatan penerimaan dari pajak kendaraan, BUMDes dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan usaha lokal dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat desa. Selain itu, penerimaan pajak yang lebih baik juga akan berdampak positif pada perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan, termasuk investasi dalam infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan demikian, pengembangan model tetrapreneur dalam BUMDes melalui E-SAMDES di Provinsi Lampung, terutama di studi kasus UPTD 4 Lampung Tengah, memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian desa dan memperkuat kontribusi dari sektor pembayaran pajak kendaraan. Atas uraian fenomena dan latar belakang masalah di atas maka Peneliti mengangkat penelitian Tesis dengan judul **“Model Tetrapreneur dalam Pengembangan BUMDes Guna Mendukung Perekonomian Desa Melalui E-SAMDES pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Studi Kasus UPTD 4 Lampung Tengah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- (1) Bagaimana Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah?
- (2) Apa hambatan yang dialami dalam Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

- (1) Memahami dan menganalisis Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

- (2) Untuk mengetahui hambatan yang dialami Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sebagai bahan tambahan pengetahuan.
- (2) Dapat menjadi bahan masukan bagi Badan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- (3) Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jurusan Magister Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- (1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan studi lanjutan, pembuatan karya ilmiah dan memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan Ilmu Administrasi, khususnya terkait dengan kebijakan publik dan implementasi publik.

- (2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi *stakeholder*, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga aktor-aktor kebijakan dapat

melakukan perbaikan atau peninjauan kembali dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Muhammad Nur Yamin	2021	PKM Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Model T-Bundes Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Desa Di Desa Campagaya Kabupaten Takalar	BUMDes Tonasa Campagaya sampai sekarang masih belum berjalan dengan baik, permasalahan yang terjadi adalah manajemen pengelolaan usaha, permodalan, SDM yang kurang terampil, pemasaran, akuntansi dan perpajakan, serta investasi. Meningkatkan pengelolaan, BUMDes harus terus meningkat kemampuan SDM yang dimiliki dan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi maupun Dinas terkait untuk melakukan pendampingan. Serta menjaga sumber dana untuk kegiatan operasi unit usaha, BUMDes harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
2	Fatimah, P. R.	2018.	Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif:Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa rekomendasi-dasi Tetrapreneur yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat dan Pemerintah desa baik pada tingkat Rantai Wirausaha Chainpreneur), Kualitas Wirausaha (Qualitypreneur), Pasar Wirausaha (Marketpreneur) maupun Merek Wirausaha Brandpreneur). Rekomendasi Tetrapreneur tersebut merupakan dasar pendekatan pembangunan sistem Q-BUMDES pengembangan wirausaha Desa Bleberan. Sistem Q-BUMDES tersebut membentuk suatu sistem basis data terpadu untuk melakukan pengendalian kualitas sehingga wirausaha desa dapat lebih adaptif kesejahteraannya.</p> <p>Penerapan Model Tetrapreneur di Desa Bleberan ini diharapkan dapat menjadi panutan bagi desa lainnya khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu model keberlanjutan dalam pengentasan kemiskinan tanpa meninggalkan kearifan lokal menuju ketahanan ekonomi dan kesejahteraan adaptif.</p>
3	Sasongko, S., & Ngabiyanto,	2020.	Strategi Bumdes dalam Meningkatkan	Hasil penelitian meliputi (1) Strategi yang digunakan BUMDes untuk

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			Pendapatan Asli Desa di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal	meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dengan mengelola 3 (tiga) unit usaha yaitu pengelolaan unit usaha sampah, pengelolaan lapangan sepakbola Desa Mororejo, dan pengelolaan wisata pantai Ngebum. Semenjak berdirinya BUMDes Moro Berkah tahun 2019 telah berhasil meningkatkan PADes sebesar 50% dari Rp 328.450.00 menjadi Rp 644.000.000 dan Rp 762.400.000, (2) Dampak peningkatan pendapatan asli desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mororejo
4	Rahmatika	2019	Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan	Hasil dari pendampingan ini adalah diharapkan BumDes dapat lebih berhasil dalam kegiatannya, karena didampingi dari unsur akademisi dan perbankan. Dengan adanya BumDes yang maju maka perekonomian masyarakat desa ikut meningkat.
5	Harmiati, A. A. Z., Zulhakim, A. A.,	2017.	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.	Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa. Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing,

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
				<p>maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.</p>
6	Kirowati, D., & Dwi Setia, L.	2018	Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)	<p>Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Peran modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung renteng merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan</p>
7	Sofyani	2019	Success Factors of Village-Owned Enterprises	The results indicated that the factors that drive the performance of BUMDes

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			(BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study	were BUMDes employees' patriotism and passion, skills, training, level of education, experience, honesty (ethical behavior), having a sense of responsibility, sincerity, seriousness, caring for the environment and society, being resilient, cohesiveness of teamwork, transparent communication between BUMDes managers, never-give-up attitude in trying to achieve the performance targets, religiosity, work satisfaction, visionary (transformational) leadership style, and the presence of incentive mechanisms.
8	Wahyu	2019	The Analysis Of Putukrejo Village Government Readiness In Forming Bumdes As A Development Efforts Of Rural Communities Based On Creative Economy	The results of the study confirms that the Putukrejo Village Government has a fairly good readiness in forming BUMDes. It is proven by the development of business units that are very helpful in empowering local rural communities. In addition, BUMDes "Barokah" also seeks to empower the community based on creative economy by establishing the tourist attraction, Sumber Sira Market, which is used to manage the products of the community creativity.
9	Alfirdausi	2019	The Role Of Village Owned Enterprises (Bumdes) On	The results of the study showed that the establishment stage of the

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>Efforts To Increase Original Village Income (Pades) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency)</p>	<p>BUMDes was to recognize the potential of the Village, socialize to the community about BUMDes, create a drafting team, hold a MUSDES, and issue PERDES. The BUMDes strategy in managing its business can be seen from the SWOT factor owned by BUMDes. The benefits of the existence of BUMDes Tirta Mandiri to the community are the many programs offered by the Village to the community, reducing unemployment, and providing assistance to people who want to become entrepreneurs. While the results of quantitative analysis are the highest average sector of Village Original Income (PADes) from the results of the Village business or in this case BUMDes.</p>
10	Arfah	2021	<p>Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Development Strategy in Increasing Village Own-source Revenue in Bantimurung, Maros Regency</p>	<p>Based on the results of the study, it shows that BUMDes in Bantimurung is not yet fully optimal but can contribute to village the own-source revenue with business units owned and the lack of facilities and supervision from the sub-district government, so that the BUMDes strategy that can be applied is the growth and build strategy, it can be recommended that the development of BUMDes</p>

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
				need support from the government through regulations, capital assistance and accompaniment. In addition, by carrying out good strategic planning for the development of BUMDes, in-depth observations and mapping of the local economic potential of villages, choosing business development, and expanding the network of cooperation partners and optimizing the role of cooperation partners and the community to jointly encourage the development of BUMDes products, strengthen markets and training for BUMDes managers on an ongoing basis.

Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2023)

2.2 Model Tetrapreneur

Tetrapreneur merupakan sebuah teori dalam melakukan pengembangan dan peningkatan usaha dengan menggunakan pendekatan-pendekatan melalui 4 (empat) faktor dasar yang terdiri dari *Chainpreneur*, *Marketpreneur*, *Qualitypreneur*, dan *Brandpreneur* (Fatimah, 2018).

1. *Chainpreneur*

Chainpreneur atau yang disebut dengan Rantai Wirausaha merupakan suatu pendekatan untuk mendeskripsikan bagaimana rantai kewirausahaan itu berlangsung atau bagaimana suplai distribusi dari produk-produk yang dipasarkan yang terdiri dari semua pihak, baik

secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Fatimah, 2018). Tujuan dengan adanya rantai pasokan diharapkan dapat memberikan nilai surplus dari setiap produk yang didistribusikan dipasaran (Cavinato, 2012).

2. *Marketpreneur*

Marketpreneur (Pasar Wirausaha) merupakan sebuah sudut pandang yang inovatif mengenai kondisi yang ada di pasar usaha terkait dengan kebutuhan para pengusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Untuk mempertahankan nilai profitabilitas, dalam berbisnis harus sadar bagaimana caranya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan efisiensi beroperasi sehingga dapat menguasai pasar ekonomi yang bertanggung jawab baik kepada konsumen, investor, regulator maupun pemerintah (Ferrel dkk, 2014).

3. *Qualitypreneur*

Qualitypreneur (Kualitas Wirausaha) merupakan sebuah rekomendasi bagaimana seorang pengusaha mampu menghasilkan usaha yang berkualitas sehingga dapat bertahan dengan segala keadaan. Biasanya ukuran untuk menilai tingkat kualitas sebuah usaha dilihat dari karakteristik dan inovasi yang dimiliki wirausaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tersirat maupun tersurat (Sower, 2011).

4. *Brandpreneur*

Brandpreneur (Merek Usaha) merupakan pendekatan berkaitan dengan nilai merek suatu produk yang ada di pasar ekonomi. *Benchmarking* adalah salah satu teknik wirausaha global yang terkenal untuk

mendorong pertumbuhan usaha melalui pendekatan nilai merek sehingga dengan brand/merek yang dimiliki produk yang dihasilkan wirausaha dapat berkompetisi dengan produk yang lain dipasar ekonomi.

2.3 Teori *New Public Management* (NPM)

Teori *New Public Management* (NPM) adalah suatu pendekatan manajemen yang berasal dari sektor swasta yang diterapkan dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi pemerintah (Ferlie E, 2015). NPM mulai berkembang pada tahun 1980-an sebagai respons terhadap kritik terhadap birokrasi tradisional yang dianggap lambat, mahal, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa prinsip dan karakteristik utama dari *New Public Management* (NPM) yang lebih rinci menurut Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017) adalah:

1. Pemisahan antara Kebijakan dan Pelaksanaan

NPM mendorong pemisahan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan program atau layanan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, sehingga proses administrasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

2. Fokus pada Hasil (*Outcome*)

NPM menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur. Tujuan dan indikator kinerja ditetapkan dengan jelas untuk mengevaluasi capaian program dan layanan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan

bahwa sumber daya yang digunakan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

3. Desentralisasi dan Otonomi

NPM mendorong desentralisasi keputusan dengan memberikan otonomi lebih besar kepada unit-unit organisasi di tingkat lokal. Dengan demikian, tingkat inovasi dan responsifitas di tingkat lokal dapat meningkat, karena mereka lebih memahami kebutuhan dan konteks masyarakat setempat.

4. Penggunaan Incentive dan Perangkat Swasta

NPM memperkenalkan penggunaan insentif dan mekanisme swasta, seperti sistem penghargaan kinerja, kontrak kinerja, dan outsourcing, untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Sistem insentif ini bertujuan untuk memotivasi pegawai publik untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

5. Fokus pada Pengukuran dan Evaluasi

NPM menekankan pentingnya pengukuran kinerja dan evaluasi berbasis data. Dengan adanya pengukuran kinerja yang objektif, kelemahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara efisien, serta mengarahkan perbaikan dan pengembangan program dan layanan yang lebih baik.

6. Keterbukaan dan Akuntabilitas

NPM mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sumber daya publik digunakan dan untuk apa, sehingga tercipta pertanggungjawaban yang lebih baik.

7. Manajemen Berbasis Hasil (*Result-Based Management*)

NPM menggunakan pendekatan manajemen berbasis hasil untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi sektor publik sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan capaian hasil yang diinginkan. Dalam manajemen berbasis hasil, penetapan tujuan berfokus pada capaian hasil yang dapat diukur dan terukur.

Meskipun teori *New Public Management* telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik di beberapa negara, ada juga kritik terkait potensi untuk mengabaikan aspek-aspek sosial dan mengarah pada "komersialisasi" pelayanan publik yang seharusnya berfokus pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi NPM harus dilakukan dengan hati-hati dan seimbang agar tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah lembaga yang didirikan ditingkat Desa yang difokuskan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa dengan menjadikan BUMDes menjadi bagian dari suatu proses produksi bagi produk-produk lokal berbahan baku lokal (Sumantra dkk, 2016). UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Perencanaan dan pembentukan BUMDes, dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dimana pengelolaanya dilakukan oleh msyarakat Desa secara gotong royong

dan tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu serta harus mementingkan hajat masyarakat Desa (Yudiardi, 2015).

Menurut Dewi dan Meirinawati (2013) menyatakan bahwa hadirnya BUMDes di tengah masyarakat desa memiliki manfaat yang besar yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di tingkat pedesaan. Berikut peran dan fungsi BUMDes diantaranya adalah (Ramadhan dkk, 2013): (1) Meningkatkan perekonomian lokal; (2) Meningkatkan pendapatan Desa; (3) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Sedangkan Menurut Gunawan (2011), BUMDes memiliki peranan diantaranya adalah dapat mengurangi laju urbanisasi serta mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat Desa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Desa.

Tujuan kegiatan didirikannya BUMDes yaitu: (1) Membentuk unit-unit usaha masyarakat Desa; (2) Memberikan pelatihan ketrampilan untuk membuat produk lokal yang memiliki daya saing kuat; (3) Memberikan pemahaman mengenai pengelolaan, proses produksi dan standarisasi produk di masing-masing unit; (4) Menyamakan pandangan mengenai kegiatan yang dijalankan sesuai dengan visi pada kelompok Desa berbeda (Sumantra, 2016). Dengan adanya fungsi dan tujuan tersebut, diharapkan BUMDes dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi nasional, dimana pemerintah melakukan pembangunan sentral ekonomi dimulai dari tingkat Desa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945 (Furqon dkk, 2018). Merujuk pada pengertian dan kualitas produk BUMDES yang belum sepenuhnya terkontrol dan masyarakat

masyarakat desa juga belum sepenuhnya mengerti manfaat BUMDES maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas usaha milik desa dan melestarikan ketahanan ekonomi masyarakat dengan sistem kewirausahaan yang lebih baik khususnya di Provinsi Lampung.

2.4 Elektronik Samsat Desa (E-SAMDES)

Program E-samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi lampung bersama-sama stakeholder terkait memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tinggal di pelosok desa. E-Samdes diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diwilayah masing-masing. Program E-Samdes yang baru diluncurkan pada 14 September 2021 lalu yang diluncurkan pertama kali di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan diresmikan oleh gubernur provinsi lampung Arinal Junaidi sebagai bentuk pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui BUMDes di Provinsi Lampung, dan bagi masyarakat Desa lebih mudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan sumber pendapatan bagi desa, Itu lantaran, layanan memakai 2 pelaksanaan yaitu salah satunya Aplikasi E-Samdes.

Aplikasi E-Samdes adalah pelaksanaan berbasis Android yang dipakai untuk menerima kode bayar dan berita tagihan pajak tunggangan bermotor. Salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. E-samdes hadir di Lampung untuk membantu wajib pajak di desa-desa terpencil yang diharapkan dapat menawarkan alternatif pajak kendaraan kepada wajib pajak yaitu pembayaran pajak kendaraan elektronik (PKB) melalui desa desa.

Terobosan E-Samdes merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Provinsi Lampung atas kerja sama Samsat Provinsi Lampung dengan Bank Lampung melalui penggunaan aplikasi Lampung Smart (L-Smart) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Transmigrasi Provinsi Lampung serta BUMDes sebagai tempat pembayaran yang berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Dinas PMDT berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, dan SWDKLLJ merupakan singkatan dari (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile dengan memanfaatkan BUMDes di dalamnya.

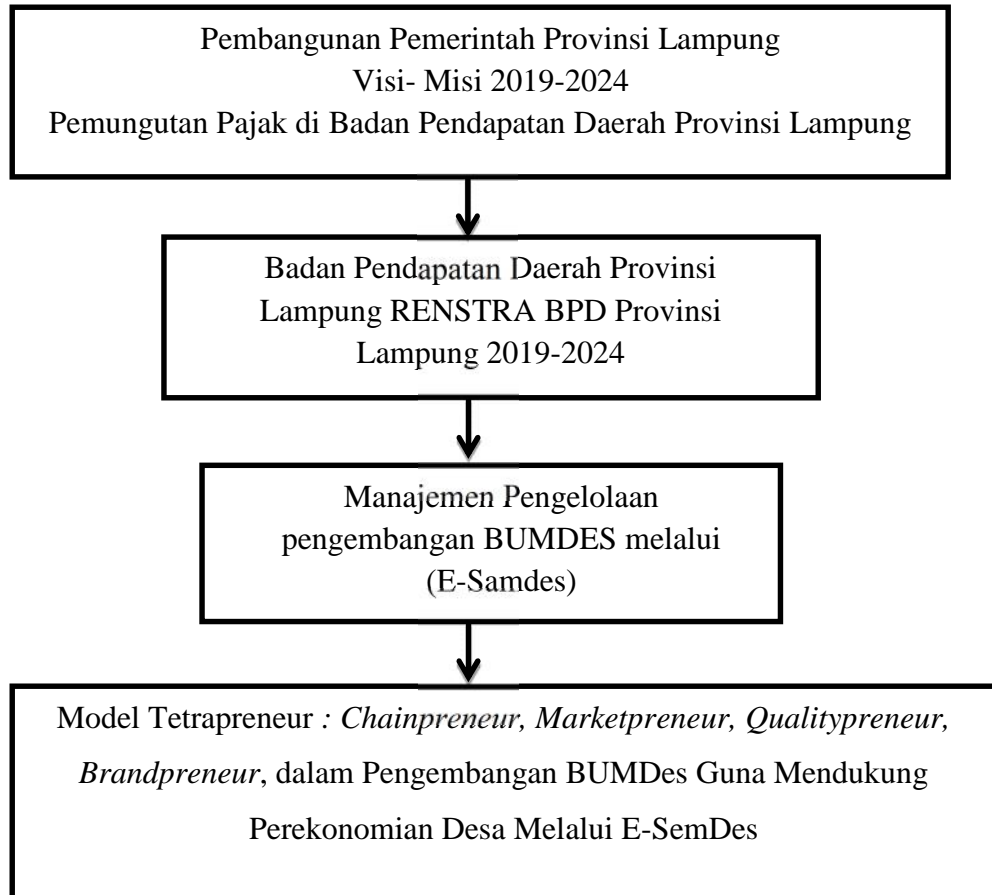
Sistem pelayanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). peluncuran program E-Samdes bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat terhadap PKB, SWDKLLJ dan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK tahunan agar lebih mudah dijangkau. Selain itu sebagai upaya optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatkan penghasilan BUMDes dan mendorong kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa

dan kesejahteraan masyarakat desa. ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor berpelat Lampung cukup dilakukan melalui BUMDes terdekat. Dengan diberlakukannya layanan e-Samdes ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada tahap pertama program E-Samdes dapat diakses pada 26 (dua puluh enam) BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung.

Strategi pemerintah untuk program E-samdes melalui BUMDes memberikan solusi yang memungkinkan masyarakat lokal memanfaatkan dukungan pemerintah dan memanfaatkan potensi daerah. Usaha milik desa dikuasai oleh masyarakat dan pemerintah desa, tidak lagi didirikan atas perintah pemerintah, tidak lagi dikuasai oleh kelompok tertentu, dan merupakan strategi bagi hajat hidup orang banyak di desa. Selain itu, tergantung pada kebutuhan dan kemungkinan desa, sistem ekonomi desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan desa terbentuk. Badan Usaha Milik Desa sebagai sarana otonomi desa harus mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa serta berperan khusus sebagai sarana kepentingan umum.

2.5 Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti 2023

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan memperoleh data berupa kata atau kalimat yang akan dideskripsikan secara jelas dan mendetail dalam bentuk kalimat (Pasolong, 2013). Berdasarkan pemaparannya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang akan menguraikan dan mendeskripsikan berbagai data yang didapatkan dalam proses penelitian. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai Implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan sistem online (E-samdes) melalui bumdes di badan pemerintahan daerah provinsi lampung khususnya pada UPTD 4 lampung tengah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009), penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan penjelasan dan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula apa yang melatar belakangi mereka berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberimakna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat). Sedangkan, Moleong (2013), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah

3.2 Fokus Penelitian

Untuk mengamati permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan Fokus Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

A. Fokus Perspektif Tetrapreneur

Penelitian ini mengkaji masalah yang terjadi dari perspektif Tetrapreneur yang merupakan sebuah teori dalam melakukan pengembangan dan peningkatan usaha dengan menggunakan pendekatan-pendekatan melalui 4 (empat) faktor dasar yang terdiri dari Chainpreneur, Marketpreneur, Qualitypreneur, dan Brandpreneur (Fatimah, 2018).

1. Chainpreneur

Chainpreneur atau yang disebut dengan Rantai Wirausaha merupakan suatu pendekatan untuk mendeskripsikan bagaimana rantai kewirausahaan itu berlangsung atau bagaimana suplai distribusi dari produk-produk yang dipasarkan yang terdiri dari semua pihak, baik

secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Fatimah, 2018). Tujuan dengan adanya rantai pasokan diharapkan dapat memberikan nilai surplus dari setiap produk yang didistribusikan dipasaran (Cavinato, 2012). Kususnya dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

2. *Marketpreneur*

Marketpreneur (Pasar Wirausaha) merupakan sebuah sudut pandang yang inovatif mengenai kondisi yang ada di pasar usaha terkait dengan kebutuhan para pengusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Untuk mempertahankan nilai profitabilitas, dalam berbisnis harus sadar bagaimana caranya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan efisiensi beroperasi sehingga dapat menguasai pasar ekonomi yang bertanggung jawab baik kepada konsumen, investor, regulator maupun pemerintah (Ferrel dkk, 2014). Yang dijalankan dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

3. *Qualitypreneur*

Qualitypreneur (Kualitas Wirausaha) merupakan sebuah rekomendasi bagaimana seorang pengusaha mampu menghasilkan usaha yang berkualitas sehingga dapat bertahan dengan segala keadaan. Biasanya ukuran untuk menilai tingkat kualitas sebuah usaha dilihat dari

karakteristik dan inovasi yang dimiliki wirausaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tersirat maupun tersurat (Sower, 2011). pada Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

4. *Brandpreneur*

Brandpreneur (Merek Usaha) merupakan pendekatan berkaitan dengan nilai merek suatu produk yang ada di pasar ekonomi. Benchmarking adalah salah satu teknik wirausaha global yang terkenal untuk mendorong pertumbuhan usaha melalui pendekatan nilai merek sehingga dengan brand/merek yang dimiliki produk yang dihasilkan wirausaha dapat berkompetisi dengan produk yang lain dipasar ekonomi. Terutama dalam mendorong Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

B. Hambatan-hambatan

Faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala-kendala Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi, Moleong menjelaskan cara yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan guna mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2013:128).

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi penelitian merupakan realitas dari masalah yang difokuskan, lokasi pada penelitian ini adalah Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah. Pemilihan lokasi Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah adalah sebagai lokasi utama dalam penelitian ini yang berfokus pada adalah Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang didapatkan langsung dari narasumber dan mengharuskan peneliti untuk terjun ke lapangan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara menggunakan pendekatan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang terperinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan dan rumusan masalah yang berkaitan dengan Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat pihak lain. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan mencatat data secara langsung tentang Penerapan Model Tetrapreneur dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sanafiah Faisal dalam (Sugiyono 2011), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, oleh karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka ikut serta langsung dalam Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

2. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai tentang Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.
3. Mereka berkenan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan tidak cenderung berasal dari gagasannya sendiri, tentang Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan pra-survei lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, dan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang Pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1 Daftar Informan

NO	INFORMAN	JABATAN
1	Drs.Evan Hendrawan	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN WILAYAH IV BANDAR JAYA
2	Asih Siti Wahyuni, SE., M.M.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD WILAYAH IV

3	Sarnubi, S.Sos	KEPLA SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN UPTD WILAYAH IV
4	Benny Andhika, SH., MH.	KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
5	Nuryadi	BUMDES TERSENYUM (WATES)
6	Bekti Wiji Asmoro	BUMDES MAJU LANCAR
7	Nurodin	BUMDES TERUSAN NUNYAI

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2023

3.6 Sumber Data

Menurut Lofland dalam (Moleong 2013), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Dalam hal ini peneliti

mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi langsung terhadap pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, arsip yang dimiliki UPTD 4 Lampung Tengah, terutama yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan program pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes) pada Pemungutan Pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, serta peneliti juga mengumpulkan literature, artikel, koran dan sebagainya yang berkaitan dengan upaya pengelolaan BUMDES dan penerapan (E-Samdes).

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh peneliti dikumpulkan melalui tahapan-tahapan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah dengan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Ada tiga tahapan pengolahan data yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010) Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian adalah:

- 1) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian;

- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan;
- 3) Penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai di seleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013) analisis data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah dilaksanakan penelitian. Analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung, terus sampai penulisan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun data, yaitu mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar dapat ditafsirkan yang dilakukan melalui 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan

demikian, data yang akan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan tabel atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna, dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Sedangkan, reliabilitas menurut Susan Stainback, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian kredibilitas (*credibility*). Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Moleong (2012:324) mengatakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1) Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara langsung.

2) Teknik Memeriksa Keteralihan Data (*Transferability*)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan penelitian.

3) Teknik Memeriksa Ketergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan.

4) Kepastian Data

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing skripsi menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

Menurut Patton dalam Moleong (2018) penelitian menggunakan teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan memastikan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai menggunakan jalan sebagai berikut:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

5) Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. Menurut Denzin dalam Moleong (2018), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yang berarti membandingkan membandingkan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Model Tetrapreneur memberikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan BUMDES dan pemungutan pajak. Melalui peran sebagai Chainpreneur, BUMDES dapat menjadi penghubung antara berbagai entitas terkait dalam proses pemungutan pajak, sehingga koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dapat berjalan lebih efisien. Sebagai Marketpreneur, BUMDES mampu memasarkan dan menyebarkan informasi tentang layanan E-SAMDES dengan lebih efektif kepada masyarakat desa dan wajib pajak. Layanan tambahan yang diberikan, seperti pengantaran dokumen pajak ke rumah wajib pajak, juga meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen. Sebagai Qualitypreneur, BUMDES menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan berkualitas dan meningkatkan kesadaran pajak di wilayah desa. Langkah-langkah strategis yang diambil, seperti pemasangan banner sosialisasi, sosialisasi bersama aparat kampung, Jasa Raharja, dan BAPENDA, serta penyebaran brosur dan iklan, berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga terhadap kewajiban membayar pajak.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Model Tetrapreneur dan E-SAMDES dalam Pengelolaan BUMDES serta penerapan pemungutan

pajak di Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di UPTD 4 Lampung Tengah adalah bahwa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya literasi digital, kekhawatiran tentang keamanan data, kesadaran dan partisipasi masyarakat, koordinasi antar instansi, serta resistensi perubahan memerlukan langkah-langkah konkret dan kerjasama aktif dari berbagai pihak terkait. Dengan upaya yang tepat dalam meningkatkan infrastruktur teknologi, menggelar program edukasi dan sosialisasi yang intensif, serta memastikan keamanan dan transparansi layanan, diharapkan hambatan-hambatan ini dapat diatasi, dan penerapan Model Tetrapreneur dan E-SAMDES dapat berjalan dengan lancar untuk mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di Lampung Tengah.

5.2 Saran

Beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur teknologi, pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah tersebut. Investasi dalam koneksi internet yang lebih baik, aksesibilitas ponsel pintar, dan fasilitas teknologi lainnya dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas layanan digital.
2. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif harus digelar untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Mengadakan pelatihan dan workshop tentang penggunaan teknologi digital serta manfaatnya bagi

BUMDES dan masyarakat akan membantu meningkatkan partisipasi dan penerimaan terhadap inisiatif digital.

3. Untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan data, perlu ada sistem keamanan yang kuat dan terpercaya. Transparansi dalam pengelolaan data dan informasi akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan E-SAMDES dan BUMDES.
4. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dari Model Tetrapreneur dan E-SAMDES melalui kampanye publik, diskusi kelompok, dan pertemuan desa. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program akan meningkatkan efektivitas dan penerimaan inisiatif tersebut.
5. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, BUMDES, dan mitra lainnya sangat penting dalam penerapan Model Tetrapreneur dan E-SAMDES. Perlu adanya koordinasi yang baik untuk menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan potensi sinergi antara berbagai pihak terkait.
6. Resistensi terhadap perubahan adalah tantangan umum dalam implementasi inisiatif baru. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan pembagian manfaat yang jelas kepada berbagai pihak yang terlibat akan membantu mengurangi resistensi perubahan dan mendapatkan dukungan aktif dari semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfa Beta.
- Bambang, B. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2), 109-131.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Ferlie, E., & Ongaro, E. (Eds.). (2015). *Manajemen Strategis dalam Organisasi Layanan Publik*. (Terjemahan oleh Gilang Rasuna Said). PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nur Yamin, (2021), PKM Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Model T-Bundes Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Desa Di Desa Campagaya Kabupaten Takalar, UNM : Universitas Negeri Makassar Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2021.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Reformasi Manajemen Publik: Analisis Perbandingan*. (Terjemahan oleh Pustaka Pelajar). Pustaka Pelajar.
- P. Siagian, S. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Cetakan Kedelapan Belas Bumi Raksa.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Pustaka Insan.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. In Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Aprilia, & Andini, K. S. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan Bagi Praktisi, Akademisi Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. In undefined. Alfabeta

b. Jurnal

- Alfirdausi, (2019), The Role Of Village Owned Enterprises (Bumdes) On Efforts To Increase Original Village Income (Pades) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency), Vol 4, No 2 (2019).
- Arfah, (2021), Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Development Strategy in Increasing Village Own-source Revenue in Bantimurung, Maros Regency, JIA: Vol 10, No 2 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.10.2.281-293.2021>.
- Cavinato, J.L. (2002). "What's your Supply Chain type?" Supply Chain Management Review May-June: 60-66.
- Dariah, A. R. (2009). Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jawa Barat. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 25(2), 143-152.
- Dewi, Y. S. R. (2013). Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Fatimah, P. R. (2018). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. Jurnal Studi Pemuda, 7(2), 122-132.
- Harmiati, A. A. Z., Zuhakim, A. A., & Sos, S. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Retrieved from: Jurnal Unihaz Bengkulu, Cluster Ekonomi. Setnas ASEAN.
- Kirowati, D., & Dwi Setia, L. (2018). Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 3(1), 15-24.
- Rahmatika, (2019), Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan, JIKW: Vol 2, No 2 (2019) <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v2i2.58>

Sasongko, S., & Ngabiyanto, N. (2020). Strategi Bumdes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 60-63. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.43577>

Sofyani, 2019, Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study, *JAI* : Vol 20, No 2: May 2019, DOI: <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>.

Sumantra, K., Yuesti, A., Suryatmaja, I. B., & Sudiana, A. K. (2016). Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif Pendukung Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pajahan Dan Munduk Temu Kecamatan Pupuan, Tabanan. *Prosiding Semnas Hasil Pengabdian Masyarakat*.

Wahyu, 2019, The Analysis Of Putukrejo Village Government Readiness In Forming Bumdes As A Development Efforts Of Rural Communities Based On Creative Economy, Vol 3, No 03 (2019),

c. Sumber-Sumber Lainnya

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa.